

ABSTRAK

Peningkatan PAD dengan cara praktis yang merugikan banyak pihak menimbulkan kekisruhan yang tidak bisa dibendung, awal tahun 2020 kenaikan tarif parkir secara tiba-tiba yang diterapkan dianggap mengagetkan masyarakat, pasalnya masih banyak yang harus dibenahi dahulu praktik perpajakan dilapangan karena masih banyak tidak sesuai dengan peraturan yang ada pun jika praktik dilapangan diperbaiki kemungkinan besar peningkatan PAD akan tercapai, oleh karenanya peneliti tertarik terhadap permasalahan tersebut dan menelitinya melalui evaluasi implementasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 sebagai peraturan yang sebelumnya sudah diterapkan.

Dalam penelitiannya peneliti menggunakan teori evaluasi Nurcholis yang meliputi input, proses, output dan outcome. Peneliti menggunakan teori ini karena ketentuan terkuat yang harus diterapkan atau ada dalam mengimplementasikan dan dalam evaluasi implementasi sebuah kebijakan, karena jika salah satunya tidak ada akan menimbulkan permasalahan baru, yang kemudian ditambahkan beberapa faktor lainnya yang bisa mempegaruhi sebuah kebijakan, seperti halnya permasalahan yang diteliti oleh peneliti tentang pelayanan parkir ditepi jalan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, data primer diperoleh dari Dinas Perhubungan, Petugas parkir di tepi jalan umum, DPRD dan masyarakat kota Tasikmalaya. data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan pendekatannya studi kasus.

Penemuan pada penelitian ini adalah ditemukannya ketidakselarasan antara Dinas Perhubungan dengan DPRD Kota Tasikmalaya serta masyarakat yang menjadi korban. Kemunculan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 itu lahir atas dasar pemenuhan target pendapatan retribusi parkir yang telah ditentukan oleh dewan legislatif. Sedangkan, dewan legislatif menargetkan pendapatan tersebut karena harus adanya pembenahan dan pengoptimalan perpajakan di Kota Tasikmalaya, karena perpajakan di kota Tasikmalaya masih banyak peluang atau celah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir tanpa harus menaikkan tarif parkir. Seperti pemotongan alur birokrasi pelaporan keuangan, adanya ketegasan bagi pelaku juru parkir liar, merubah sistem pembayaran menjadi berlangganan akan tetapi ditanggapi berbeda oleh Dinas Perhubungan yang pada akhirnya menaikkan tarif parkir melalui peraturan walikota Nomor 51 Tahun 2019 yang menjadi objeknya adalah masyarakat.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019

ABSTRACT

An increase in PAD in a practical way that is detrimental to many parties creates unrest that can not be dammed, by early 2020 a sudden increase in parking tariffs is considered shocking to the public, the article is still a lot that must be addressed first practice of parking in the field because there are still many not in accordance with regulations even if the practice in the field is improved it is likely that an increase in PAD will be achieved, therefore researchers are interested in the problem and research it through the evaluation implementation of mayor regulation (PerWal) Number 51 of 2019 as a regulation that had previously been applied.

In his research the researcher used Evaluation Nurcholis's theoretical comprise input, process, output, outcome . Researchers use this theory because the strongest provisions that must be applied or exist in implementing a policy, because if one is not there will cause new problems, which then added several other factors that can affect a policy, as well as the problems examined by researchers about parking services on the edge of the road.

This research is a descriptive study, primary data obtained from the Department of Transportation, Officers of parking service charges on the edge of public roads, DPRD and the people of the city of Tasikmalaya. Secondary data is secondary legal material which includes laws and regulations, books, journals and other research results related to this issue. The data collection technique is done by interview technique. After the data is collected, it is analyzed qualitatively using a case study approach.

The finding in this study where the finding of inconsistencies of departemen of transportation and DPRD of Tasikmalaya city and the people who were victims. The emergence of mayor regulation number 51 of 2019 was born on the basis of fulfilling the parking fee revenue target set by the legislative council. Meanwhile, the legislative council is targeting this revenue because there must be improvement and optimization of estimates in the Tasikmalaya city, because parking in the Tasikmalaya city still has man opportunities to explore local sources of revenue from the parking fee sector without having to increase parking rates. Such as cutting the bureacratic flow of financial reporting the existance of assertiveness for illegal parking attendants, chaing the payment system tu subscription. However, the departmenet of transportation respoded differently, which in the end raised paring rates through mayor regulation number 51 of 2019, the object of which is the public.

Keywords: *evaluation implementation, Mayor Regulation Number 51 of 2019*